

**REAKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM
BENTUK KEBIJAKAN PENDIDIKAN UPAYA MEMPERKUAT
IDENTITAS BANGSA**

La Januru

STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta

(janu.gempar@yahoo.com)

ABSTRAK

Tujuan dari penyusunan tulisan ini, yakni untuk memberikan gambaran bagi penentu kebijakan pendidikan bahwa keragaman kultur dan bahasa yang dimiliki masyarakat Bangsa ini harus dikelola secara profesional agar menjadi alternatif dalam memajukan kondisi Bangsa dan upaya membentuk jati diri suatu Bangsa. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya sederhana ini, yakni analisis wacana kritis (CDA). Isu yang diangkat dalam tulisan ini, yakni mengangkat satu bahasa bagi masyarakat suku “Cia-Cia” yang ada di Kabupaten Buton Selatan tepatnya di Kecamatan Batuatas. Adapun bahasa yang coba dikaji dalam tulisan ini, yakni “Maea” dan “Koadhabu”, salah satu kalimat sakral dan bisa juga disebut sebagai slogan hidup bagi masyarakat Suku “Cia-Cia yang ada di Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan.

***Kata Kunci** : Aktualisasi, Kearifan Lokal, Kebijakan Pendidikan, Jati Diri Bangsa.*

A. PENDAHULUAN

Multikulturalisme yang tumbuh dan melekat kedalam Bangsa Indonesia eksistensinya telah ada jauh sebelum Bangsa ini memproklamkan Kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945. Berbagai macam budaya yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat yang ada diseantero Nusantara sudah selayaknya menjadi ciri sekaligus kebesaran Indonesia. Tidak hanya itu, nilai-nilai kearifan lokal tersebut sepatutnya menjadi modal bagi Bangsa ini untuk sejajar dengan Negara-Negara lain yang mampu meraih kecemerlangan dengan

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu Negara yang berhasil menata kemajuan Bangsaannya melalui pelestarian budaya lokalnya ini bisa dilihat dari kesuksesan Jepang. Negara ini hanya dengan mengangkat kimono menjadikan Jepang sejajar dengan Negara-Negara maju yang lain.

Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Bangsa sama halnya juga memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang ada dalam sebuah Bangsa. Sebagaimana ungkapan Saiful Arif, dkk yang mengatakan bahwa mengupas sebuah kebudayaan merupakan kajian yang paling penting sebab hal tersebut sedikit banyak akan mengupas manusia dan kehidupannya. Bahkan harkat dan martabat manusia ini sebenarnya bisa tercermin dari budaya yang dihasilkannya.

Hal ini adalah mandat perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) dirumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Jepang misalnya, hanya dengan melestarikan kimono mampu meningkatkan daya saing Bangsaannya, dimata dunia. Kimono adalah satu prinsip hidup yang artinya *“kebesaran negara dikenal dari kultur (lokal wisdom) yang dimiliki negara tersebut”*. Kemahiran melestarikan kultur ini lah sehingga kimono menjadi alat perekat Bangsa, menjadi ciri dan simbol sakral bagi Bangsaannya.

Berbeda dengan Indonesia jika Indonesia mempunyai akar budaya, multi-etnik dan heterogen. Secara sosiologis Jepang sebagai bangsa mempunyai struktur sosial yang seragam, tetapi harmonis, spiritual pragmatis dan patuh pada aturan. Sehingga proses Jepangisasi atau menjepangkan orang jepang tidak terjadi seperti yang terjadi di negara Amerika. Selanjutnya bagaimana dengan

Indonesia, yang mempunyai beragam aspek lokalitas tersebar di seluruh daerah yang ada di Nusantara ini. Sudah sepatutnya Indonesia memikirkan model atau metode pelestarian potensi-potensi kearifan lokal yang dimiliki Bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan dengan model pelestarian ini, yakni ruang ekspresi peremajaan potensi lokal.

Seperti lahirnya kebijakan pendidikan yang berfokus pada perkembangan anak manusia Indonesia sebagai pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab atas keanggotaannya sebagai warga Negara Indonesia yang pluralistik. Maka, kebijakan pendidikan dan kebijakan publiknya juga harus berfokus kepada kepentingan bersama dari insan Indonesia dalam membangun Negara Bangsa yang makmur, kuat dan berkeadilan melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Salah satu nilai atau aspek lokal yang dimiliki masyarakat Batutas yang ada di Kabupaten Buton Selatan adalah "*Maea* dan *Koadhabu*". Dua kalimat ini bukanlah kalimat yang diyakini tanpa makna, melainkan kalimat yang penuh makna. *Maea* adalah satu kalimat dalam bahasa cia-cia bagi masyarakat Batutas yang ada di Buton Selatan yang artinya "malu". Sedangkan "*Koadhabu*" dapat dimaknai sebagai "beradap". Dua kalimat ini digunakan oleh masyarakat atau entitas adat Batutas dalam pergaulan sehari-hari, kalimat "malu" misalnya, dapat digunakan jika ada orang yang memakan hak orang lain, maka orang yang peduli dengan kejadian tersebut akan mengatakan kepada pihak yang melakukan tindakan keliru tersebut dengan ungkapan "*maeapo isooancu momaa munciano hakumu*" ini jika yang peduli tadi ketemu langsung dengan pihak yang makan sesuatu yang bukan haknya sedangkan "*cia namaea ba mangkee nomaa munciano hakuno mai*".

Kalimat ini diungkapkan jika yang peduli tidak ketemu langsung dengan pihak yang makan sesuatu yang bukan haknya tadi. "*maeapo isooancu momaa munciano hakumu*" ini artinya "Apa kamu tidak malu makan sesuatu yang bukan hakmu". Sementara kalimat "*Cia namaea ba mangkee nomaa munciano hakuno mai*" artinya "Apa dia tidak malu dia makan sesuatu yang bukan

haknya sana”.Kalimat di atas substansinya juga sama dengan bahasa cia-cia masyarakat/entitas adat Batuatas yang lain seperti kalimat atau kata “*Koadhabu*”. Kata atau kalimat ini diungkapkan ketika terjadi peristiwa kejahatan seperti pemukulan, perkosaan atau penganiayaan bahkan pembunuhan. Maka, pihak yang peduli dengan kejadian ini akan mengatakan “*Mia iamai cia nakoadhabu noala unkgaka/kakalambe munciano mowineno*” ini artinya “*Orang itu tidak beradab dia perkosa anak-anak atau gadis yang bukan istrinya*”. Kata atau kalimat ini jika dilihat secara detail mengandung unsur moral dan pendidikan, karena itu bukan tidak mungkin jika dua kalimat itu dilestarikan sebagai objek kajian dalam proses pelaksanaan pendidikan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi penanaman nilai-nilai moral pada masyarakat luas. Berdasarkan hal ideal sebagaimana penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tulisan “Reaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan lokal Kedalam Bentuk Kebijakan Pendidikan Upaya Membentuk Jati Diri Bangsa”.

B. PEMBAHASAN

Konsep Aktualisasi Kearifan Lokal

Salah satu upaya merekonstruksi sub-sub kultur yang ada, seperti sekolah atau lembaga pendidikan non-formal dan Instansi Pemerintah yang tugas utamanya sedikit banyak bersentuhan dengan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah misalnya, belum mencerminkan semangat dan upaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pentingnya meramu kebijakan pendidikan dan kebijakan publik yang didesain atas semangat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal adalah upaya mendorong pendidikan sebagai strategi membangun peradaban Bangsa. Yang hal ini, mensyaratkan lahirnya kebijakan pendidikan yang mampu mengakomodir aspek-aspek lokal Daerah.

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan berpengaruh besar bagi pembentukan kepribadian manusia dan sekaligus jati diri suatu Bangsa. Sebab dengan kebijakan pendidikan yang mengangkat eksistensi nilai-nilai kearifan lokal ini menurut S. Bloom sebagaimana dikutip M. Musehthafa manusia diharapkan mampu membangun diri, komunitas, dan alam semestanya. Sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan (formal), sejatinya adalah ruang bagi peserta didik memperoleh keleluasaan untuk menggali potensi kreativitas sekaligus mengekspresikannya.

Sekolah dalam pengertian yang lebih luas adalah ruang dalam penguatan nilai-nilai luhur dan moralitas peserta didik. Dalam perkataan lain pelaksanaan pendidikan disekolah seharusnya diarahkan untuk mengasah kecakapan berpikir, sosial, spritual, dan etika. Sebab pendidikan sejatinya adalah media untuk mendorong peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir, menggali potensi kreativitas, dan menggali potensi-potensi luhur, dan kepekaan sosial.

Dengan demikian upaya membangun komunikasi antar entitas masyarakat seperti dialog kebudayaan adalah menjadi media yang paling efektif. Nihilnya kebijakan yang tidak menjembatani lahirnya dialog antar entitas masyarakat ini kental sejak era otoritarian Orde Baru. Pada masa Orde Baru, nyaris semua sendi budaya dimuarahkan kepada apa yang dinamakan sebagai kebudayaan nasional yang sentralistik yang diterapkan secara represif dan Militeristik sebagai jalan dalam mengurai perbedaan dan konflik kebudayaan telah menidurkan proses dialog kebudayaan yang seharusnya dilakukan sebagai proses yang diametral.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip Arif mengatakan bahwa berbeda budaya secara teoritik bisa menimbulkan gesekan. Dalam istilah sosialnya lanjut Arif bahwa gesekan tersebut dapat dilihat dalam pengertian sebuah interaksi simbolik antar budaya ini pasti ada. Tetapi gesekan tersebut dapat diminimalisir asalkan pemicu terjadinya bukan oleh

kepentingan ekonomi politik, nyaris tidak mungkin perbedaan kebudayaan mengarah kepada konflik sosial. Yang ada adalah saling memperkaya.

Pentingnya dialog kebudayaan disini bukan berarti meninggalkan kebudayaan atau identitas asal, akan tetapi adanya “pengakuan terhadap yang lain”. Dalam hal ini adalah pengakuan terhadap sudut pandang dan pengalaman yang lain dalam koherensi dan kejujuran mereka. Kebijakan pendidikan yang fokus untuk mewujudkan terjadinya dialog kebudayaan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Adapun langkah praktis dari visi ini, yaitu : *pertama*, mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi lahirnya dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak sampai melebar menjadi konflik Sosial. *Kedua*, mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Ke-Bangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil (*civil society*). *Ketiga*, menyegarkan kembali potensi-potensi lokal yang ada di Daerah. *Keempat*, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam Negeri. Kondisi Indonesia yang secara geografis dicirikan dengan kentalnya kepulauan dan pada saat yang sama berbagai kepulauan yang tersebar dipelosok Nusantara juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal (*lokal wisdom*) yang sangat beragam. Masyarakat Batuatas misalnya, sebagai bagian dari komunitas masyarakat atau entitas budaya yang ada di Kepulauan Buton Selatan Indonesia selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perhatian yang dimaksud disini, yakni bagaimana lahirnya sebuah kebijakan pendidikan yang mampu melestarikan aspek-aspek kearifan lokal yang ada disana. Mengingat kita saat ini telah berada pada masa atau era Otonomi Daerah semestinya Pemerintah Daerah bisa mendapatkan ruang gerak yang besar dalam melestarikan potensi yang ada melalui otonomisasi yang ada untuk mengelola secara profesional nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buton Selatan.

Kearifan Lokal Sebagai Jati Diri Bangsa

Bangsa yang besar lahir bukan dari rahim kolonialisme melainkan dari iktidar besar entitas masyarakatnya dalam mengelola setiap potensi yang dimilikinya secara baik dan penuh rasa tanggung jawab. Keberhasilan Negara Jepang dalam melestarikan kimono sebagai identitas yang tidak bisa terlepas dari bahasa dan budaya Jepang telah menghipnotis bangsa lain untuk mengakui identitas kejepangan tanpa harus melakukan jepangisasi bagi rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia yang memiliki keaneka ragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Mampu kah multikulturalisme yang ada tersebut mengantarkan Indonesia sejajar dengan Negara maju yang lain seperti Jepang.

Multikulturalisme yang dimiliki Bangsa ini jika dikelola secara baik, bukan tidak mungkin akan menjadi kekuatan ekspansi Indonesia dalam mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia dimata dunia. Adapun satu diantara banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah kata atau kalimat dalam bahasa cina-cina masyarakat atau entitas adat yang ada di Batutas seperti kata atau kalimat "*Maea*" dan "*Koadhabu*". Secara literal, dua kalimat ini mempunyai unsur mendidik dan keduanya jika difahami dengan benar, maka akan menyerap makna positif dalam kata atau kalimat tersebut. Filosofi kata atau kalimat yang syarat makna ini sudah selayaknya mendapat perhatian dari semua elemen untuk dijadikan referensi dalam kehidupannya.

Dengan adanya Otonomi sepatutnya konsep ini menjadi mudah dijalankan. Kata atau kalimat "*Maea*" dan "*Koadhabu*" sebagaimana dijelaskan di atas, dilestarikan oleh komunitas masyarakat cina-cina atau entitas adat Batutas sebagai bahasa sehari-hari untuk menjadi media komunikasi yang bisa memberikan pesan moral dan sosial. Alasan kenapa kata atau kalimat di atas, mengandung unsur mendidik dan pesan sosial karena kata ini digunakan pihak mana pun setelah melihat tindakan orang yang bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti menyalagunakan kewenangan, perbuatan asusila, tindakan kejahatan, manipulasi dan lain-lain. Adapun contoh praktis penggunaan kata

atau kalimat tersebut, yakni "*Cia cumae moapa mombolaku barano mia*" artinya "*Apa tidak kamu malu kenapa kamu curi barangnya orang*". Kalimat ini jika didekati dengan menggunakan analisis teks kebahasaan, maka terdapat unsur pendidikan didalamnya. Mulyana dalam menganalisis teks bahasa dengan cara memaknai bahasa tidak hanya pada teks bahasanya, melainkan melihat konteks dan maksud yang mengatakan bahasa tersebut.

Pada kata "*Koadhabu*" misalnya, digunakan sebagai ungkapan untuk mengingatkan kepada orang yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar norma dan nilai-nilai etis. Contohnya : "*Koie mopabebea mia bara noraposo Adhabuno mia*". Artinya "*Jangan kamu perbodohi orang lain nanti kamu terkutuk karena amarah orang*". Kalimat ini, jika ditafsirkan melalui analisis kebahasaan Mulyana yang memfungsikan alat analisis wacana atau kebahasaan merujuk pada upaya memaknai kalimat secara kontekstual dan melihat maksud dan tujuan pengguna bahasa tersebut. Contohnya : "*Koie kapipigau karaja mbarikeeari cia nau mela pande nobadi kita mia*" artinya "*Jangan kerjakan hal-hal seperti itu, tidak baik nanti kamu tidak disenangi orang*". Kata "*koie*" pada kalimat ini bersifat deiktif, yaitu menunjukkan personal yang mengucapkan kalimat itu. Sedangkan makna pragmatiknya, yaitu ada maksud dan tujuan dari yang mengucapkan bahasa tersebut, artinya yang mengucapkan bahasa tersebut mempunyai kekhawatiran bahwa jangan sampai perbuatan jelek tersebut membawa efek atau berdampak secara luas pada masyarakat.

Perumusan metode yang tepat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal bagi Indonesia yang kaya akan unsur kearifan lokal adalah keniscayaan. Mempertahankan sesuatu tanpa metode yang matang merupakan awal dari lahirnya bencana. Praktik pengelolaan atau pelestarian unsur kearifan lokal yang mengabaikan pentingnya metode hanya akan menjadikan eksistensi budaya lokal akan terkikis oleh kuatnya hegemoni budaya global.

Rumusan metode pengelolaan nilai-nilai kearifan lokal paling tidak dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan antara lain melalui Kebijakan Pendidikan. Adanya kebijakan pendidikan ini diyakini akan mampu membawa dampak positif terhadap keberadaan potensi kearifan lokal termasuk dalam pengelolaan unsur-unsur kearifan lokal. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita fahami sepenuhnya oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan.

Pertama-tama mengenai istilah kebijakan (*policy*) yang sering kali dicampur adukan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Karena itu, yang mendesak dilakukan saat ini adalah bagaimana memangkas tradisi yang telah berlangsung lama mengakar, dimana kenyataan bahwa sekolah terlampaui banyak mengantungkan diri pada prakarsa Pemerintah dan abai atas lahirnya inisiatif penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan mutu kemampuan profesional dan keterampilan mereka, seperti penataran, pelatihan, seminar, studi lanjut, studi banding dan sejenisnya agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan profesional.

Mengingat pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Maka, kecenderungan sebegini besar sekolah dalam membumikan argumen atau doktrin para pemikir modern merupakan awal dari lahirnya bencana bagi masyarakat lokal. Rentanya konflik antara peserta didik disekolah, kentalnya budaya nyontek disekolah adalah bukti dari ini semua. Sehingga, sekolah kerap dikritik sebagai tempat atau karantina yang mungkin saja membelenggu kebebasan manusia dalam berekspresi, (*deschooling society*), tetapi hingga saat ini hanya sekolah yang diluar

keluarga (*family*) masih memiliki kekuatan melakukan perubahan, baik terhadap perorangan maupun kelompok.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah dan Bab-Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal kedalam bentuk kebijakan pendidikan belum dilaksanakan secara konsisten oleh sub kultur seperti sekolah. Hal ini dapat terlihat dari pola penetapan kebijakan sekolah yang masih terkungkung oleh kepentingan Penguasa yang terjebak pada sistem kapitalisasi ekonomi. Sehingga sekolah seolah-olah kental dengan biaya yang mahal. Kealpaan sekolah dalam membangun kemitraan bersama orang tua murid dan masyarakat setempat adalah bukti bahwa sekolah telah terjebak dengan sistem yang cenderung kapitalistik yang menjalankan pendidikan berorientasi pada profit (untung rugi).

Saran

Merujuk pada pemaparan dalam kesimpulan di atas, maka saran sekaligus rekomendasi yang tepat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekolah sebagai unit yang dipercaya atau dimandatkan oleh Undang-Undang untuk menjalakan pendidikan hendaknya membangun kemitraan yang masif dengan orang tua murid dan masyarakat dalam menjalankan program pendidikan yang ramah masyarakat.
2. Pemerintah sebagai penanggung jawab atas semua aktivitas sekolah secara konsisten merangkul semua kalangan yang berkompeten untuk merumuskan lahirnya kebijakan pendidikan yang mampu mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal.
3. Kebijakan pendidikan yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang dituangkan dalam kurikulum yang digunakan setiap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Baedowi. 2012. Calak Edu : Esai-Esai Pendidikan. Jakarta : Pustaka Alvabet.

Dyah Meta Ratna Novia. 2008. <http://ksklh.blogspot.co.id/08/kimono-dalam-perspektif-nilai-nilai.html>, diakses 19 Oktober 2016.

Eriyanto. 2012. Analisis Wacana : *Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta : LkiS.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/17/jaga-kearifan-lokal-ri-perlu-mencontoh-jepang.html>, diakses pada 19 November 2016.

Kedaulatan Rakyat, edisi 21 November 2016.

Mushthafa M. 2013. Sekolah Dalam Himpitan Google dan Bimbel, Yogyakarta : LKIS.

Mochtar Buchori. 2005. Indonesia Mencari Demokrasi, Yogyakarta : Insist Press.

Mulyana. 2005. Kajian Wacana : Teori, Metode & Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sudarwan Danim. 2010. Pengantar Pendidikan : Landasan, teori, dan 234 metafora Pendidikan, Bandung : Alfabeta.

—————, dkk. 2009. Profesi dan Profesionalisasi Tenaga Kependidikan, Yogyakarta : Paradigma Indonesia.

Saiful Arif, dkk. 2013. Sejarah dan & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Dalam Kehidupan Bernegara Bangsa, Malang : Program Sekolah Demokrasi dan Averroes [Community](#).

Sobirin Malian, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi Manusia, Yogyakarta : Tim UII Press.

Tilaar. 2012. Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.